

# KLIPING BERITA

Sumber : Suara NTB

16 Agustus 2023

LOMBOK BARAT

## Jadi Temuan Berulang BPK, Utang Pajak Di Lobar Tembus Rp52 Miliar

*BYSUARANTB.COM 16 AGUSTUS 2023*



*Tim Bapenda turun menagih pajak dari WP*

**Giri Menang (Suara NTB)** – Utang pajak bumi dan bangunan (PBB) dan denda pajak di Lombok Barat menjadi temuan berulang BPK RI. Pasalnya, hingga kini utang PBB dan denda pajak itu tak kunjung tuntas. Bahkan, saat ini utang PBB mencapai Rp47 miliar. Ditambah utang denda yang belum dibayarkan wajib pajak mencapai Rp5,8 miliar, sehingga totalnya piutang pajak dan denda mencapai Rp52 miliar.

Kepala Bapenda Lobar, H. Ahmad Subandi menyebut, piutang pajak PBB di Lobar besar. "Utang PBB itu mencapai Rp47 Miliar, pokok plus denda," sebut dia, kemarin. Piutang ini terhitung sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu upaya menangani piutang dengan dilakukan pemutihan pada HUT RI , dimulai berlaku satu bulan Agustus.

Dampaknya, dari sisi denda berkurang namun pembayaran tunggakan bisa meningkat. Pihaknya juga sudah meminta semua UPTD untuk menagih piutang pajak ini. Sementara, pendapatan daerah dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah bersumber dari denda beberapa pajak daerah belum ditagih maksimal. Pasalnya, dari data Bapenda terdapat Rp5,57 miliar denda pajak tersebut belum dibayar oleh para wajib pajak. Hingga Juli, baru Rp194 juta yang dibayar ke daerah.

Bedasarkan data Bapenda per Juli lalu, realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah baru Rp205 juta lebih dari total target Rp5,58 miliar lebih. Terdapat empat denda yang masuk potensi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, terdiri dari denda pajak hotel sebesar Rp1,43 miliar lebih. Realisasinya masih nihil. Denda pajak restoran sebesar Rp1,56 miliar lebih, sejauh ini realisasinya juga masih nol. Pajak hiburan, tidak terdapat denda. Kemudian PBB, dari denda Rp2,58 miliar baru berhasil ditagih Rp194 juta.

Kalau dibanding data periode yang sama tahun lalu, progres pembayaran denda tahun ini mengalami penurunan sekitar 15 persen lebih.

Kepala Bapenda melalui Kabid Pelayanan Bapenda Lobar, Arya Damarwulan mengakui denda pajak ini masih menjadi PR, karena WP belum dibayar utang ke pemda. "Karena yang berhutang belum bayar ke Pemda, seperti hotel di Senggigi," jelas dia, akhir pekan kemarin. Dijelaskan, piutang salah satu hotel berbintang itu sangat besar, sehingga berpengaruh terhadap denda pajak. Baik itu denda pajak hotel, restoran dan PBB. Diakui, pembayaran denda pajak hotel dan restoran masih nihil. Akan tetapi sebagian WP mencicil pokok utangnya. Sedangkan denda PBB ada progresnya. Hanya saja Pihaknya masih melihat situasi, pasca dampak Corona, pemda tidak terlalu saklek menerapkan kebijakan bagi WP. **(her)**